

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan;

1. Faktor Regulasi yang terdiri dari Peraturan Pemerintah Pusat secara normatif sangat bagus, namun dalam penyampaiannya ke daerah belum tepat waktu. Mengakibatkan keterlambatan penerbitan Peraturan Bupati yang berkaitan dengan sosialisasi peraturan pemerintah pusat, sehingga dalam implementasi program dan kegiatan menjadi terhambat.
2. Faktor Pelaksanaan Anggaran serta pertanggungjawaban sudah berjalan sesuai dengan prosedur.
3. Faktor Kapasitas Sumber Daya Manusia dilihat dari pihak pengelola dan pihak penerima sudah mencerminkan kesanggupan dalam pengelolaannya.
4. Faktor Penganggaran Daerah yang berkaitan dengan perencanaan, penyusunan serta penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah dilakukan tepat waktu.
5. Faktor Pengawasan yang terdiri dari monitoring dan evaluasi telah dilakukan sejalan dengan pengelolaan Dana Alokasi Khusus tersebut, Namun belum konsisten dalam pengevaluasian.

6.2 Saran

1. Peraturan Pemerintah Pusat dalam penyalurannya ke daerah sebaiknya tepat waktu sehingga Pemerintah Daerah dapat mensosialisasikannya sebagai pedoman dalam mengimplementasikan program dan kegiatan.
2. Pelaksanaan Anggaran serta pertanggungjawaban terus ditingkatkan berkaitan dengan waktu serta sesuai dengan prosedur dan sistem yang ada.
3. Sumber Daya manusia baik sebagai pengelola dan penerima perlu meningkatkan pemahaman terhadap penyaluran dan penggunaan Dana Alokasi Khusus sehingga dapat menyesuaikan diri dengan perubahan regulasi yang sering mengalami perubahan.
4. Sebagai bagian dari siklus pengelolaan keuangan daerah, penganggaran daerah merupakan salah satu faktor kunci suksesnya pelaksanaan siklus-siklus lainnya. Oleh karena itu penganggaran daerah yang meliputi perencanaan anggaran yang di dalamnya termasuk perencanaan dan penetapan Perda APBD harus terus ditingkatkan baik dari sisi waktu penetapan maupun peraturan.
5. Monitoring dan Evaluasi sebaiknya dilakukan berkala secara rutin sehingga terciptanya efektivitas dan akuntabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Saiful, 2004. *Sendi-sendi Hukum Administrasi Negara*. Glori Madani
- Bastian, Indra, 2007. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat
- Direktorat Penyusunan APBN, Dikrektorat Jendral Anggaran, Kementerian Keuangan. 2013. *Dasar-Dasar Penyusunan APBN di Indonesia*
- Fishbein dan Ajzen, 1980. *The Theory of Reasoned Action*
- Garrison dan Noreen, 2001, *Akuntansi Manajerial* ,penerjemah Budisantoso, A. Totok. buku 2. Jakarta : Salemba Empat
- Halim, Abdul, 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta.Salemba Empat
- Heriyanto Jemi,2010. *Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah*. Fakultas Ekonomi, Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
- Kaharuddin dan Abdul Halim, 2013.*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Belanja Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan di Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2010*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gajah Mada. Jurnal Akuntansi dan Manajemen Vol. 24 No. 1
- Manullang, M, 1995. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta. Ghalia Indonesia
- Mahmudi,2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta. UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo, 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Andy Offset. Yogyakarta
- Munandar. M. 2001. *Budgeting, Perencanaan Kerja Pengkoodinasian Kerja Pengawasan Kerja*. Edisi Pertama. Yogyakarta. BPFE Universitas Gajah Mada
- Nafarin, M, 2001. *Penganggaran Perusahaan*. Edisi Pertama. Jakarta. Salemba Empat
- Nawawi, Hadari, 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Bisnis yang Kompetitif*. Yogyakarta. Gajah Mada University-Press

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 100 tahun 2013 tentang *Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan tahun 2014*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2005 tentang *Dana Perimbangan*
- PosKupang, 2014. *Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2014, Terancam Hangus*.Edisi(20/6/2014)
- PosKupang, 2014. *Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (PPO) Kabupaten Kupang hingga saat ini baru mencapai 16 persen*.Edisi (12/11/2014)
- Prayudi, 1981. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta. Ghalia Indonesia
- Siagian dan Sondang P.,1989. *Filsafat Administrasi*. Jakarta. Haji Mas Agung
- Sugiyono,2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta
- Sugiyono, 2006.*Teknik Penelitian*. Yogyakarta. Pines
- Supriyono, 1990. *Pemeriksaan Manajemen dan Pengawasan Pemerintah Indonesia*. Edisi Kesatu. Yogyakarta. Badan Penerbit Fakultas Ekonomi (BPFE)
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*
- Undang-undang Nomor 55 Tahun 2005 tentang *Dana Perimbangan*